



Belanja Modal Baru 67 Persen

■ DJPb Kalbar: Pertumbuhan Ekonomi Dibawah Target

PONTIANAK, TRIBUN - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat melakukan kegiatan rilis Kinerja APBN dan Makro Ekonomi tahun 2019. Kepala DJPb Kalbar, Edih Mulyadi dalam pemaparannya menyebutkan pagu belanja pemerintah pusat dan dana transfer pusat pada Kalbar mencapai Rp 31 triliun.

"Angka itu meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 2,35 persen" ucap Edih Mulyadi saat menyampaikan paparannya, Rabu (18/12).

Dari Rp 31 triliun itu, baru direalisasikan sebesar Rp28, 31 triliun atau baru mencapai 91,32 persen. Lanjut disampaikannya, bahwa belanja modal memiliki persentase paling kecil realisasi yaitu baru 67,04 persen. "Memang persentasenya paling kecil, karena banyak pekerjaan yang baru selesai

dan dimintakan pembayaran akhir tahun," tambahnya.

Edih menegaskan permasalahan yang terjadi di Kalbar terkait pembelanjaan APBN adalah perencanaan penganggaran yang tidak tepat dan tidak sesuai kebutuhannya. Kemudian adapula blokir belanja dan permasalahan eksekusi pengadaan barang dan jasa berupa keterlambatan penyediaan lahan. Keterbatasan vendor dan ketidaktersediaan barang. Permasalahan eksekusi peraturan dan mekanisme seperti keterlambatan petunjuk teknis kegiatan dan restrukturisasi PUPR yang menyebabkan keterlambatan administrasi.

Sementara Kepala BPS Kalbar, Pitono, menyampaikan terkait pertumbuhan ekonomi Kalbar tahun 2019 triwulan ketiga hanya 5,06 persen. Angka ini lebih rendah dari target yang tertuang

dalam RPJMD Kalbar yang 5,20 persen. "Inilah kondisi pertumbuhan ekonomi kita, pertumbuhan kita stagnan di angka 5 beberapa tahun terakhir," ujarnya.

Ekonomi Kalbar, disebutnya, ekonomi terbuka, sehingga sangat berpengaruh dari perkembangan ekonomi negara lainnya. Ditambah perang dagang AS dan China semakin mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ada di Kalbar.

Kemudian struktur PDRB Kalbar empat besar adalah pertama pertanian, perkebunan dan perikanan, kedua industri pengolahan, ketiga perdagangan dan keempat konstruksi. Masih rendahnya serapan anggaran APBN khususnya pada belanja modal yang hanya mencapai 67,04 persen juga dianggap mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. **(oni)**